

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KPU KABUPATEN SUKOHARJO

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

KPU Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana Strategis KPU Kabupaten Sukoharjo berbasis pada Visi dan Misi.

VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara pemilihan umum, dan lembaga penyelenggara lainnya, serta terlaksananya pemilihan umum yang adil dan demokratis.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial

lainnya

Basis
Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

KPU Kabupaten Sukoharjo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengaku: dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

Kebijakan
Akuntansi

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Kabupaten Sukoharjo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPU Kabupaten Sukoharjo telah mengadakan 8 (delapan) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan di KPU Kabupaten Sukoharjo serta penambahan kode output serta penambahan pagu belanja dari eselon I. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.360.634.000	2.434.668.000
Belanja Barang	31.007.540.000	31.237.240.000
Belanja Modal	15.000.000	355.732.000
Jumlah Belanja	33.383.174.000	34.027.640.000

Belanja barang tersebut terdiri dari belanja yang berasal rupiah murni sebesar Rp 31.136.462.000 dan dari Hibah sebesar Rp 100.778.000.

Realisasi
Pendapatan Negara
dari Hibah
Rp89.369.608

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir TA 2019 adalah sebesar **Rp89.369.608** atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp0**. Pendapatan KPU Kabupaten Sukoharjo terdiri Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	0	0	0,00
Pendapatan Lain-lain	0	89.369.608	0,00
Jumlah	0	89.369.608	0,00

Pendapatan tersebut berasal dari:

1. kelebihan Pembayaran kelompok kerja pada tahun anggaran 2018 senilai Rp 11.427.500 yang telah disetor pada tanggal 28 Maret 2019

2. Hasil Lelang penjualan kertas suara dan formulir Pilgub Jateng 2018 senilai Rp 3.510.000 yang disetor tanggal 02 Juli 2019
3. Hasil Lelang penjualan peralatan dan mesin yang telah rusak senilai Rp 4.700.000 yang disetor pada tanggal 02 September 2019
4. Hasil Lelang penjualan peralatan dan mesin yang telah rusak senilai Rp 69.732.108 yang disetor pada tanggal 07 Oktober 2019

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI 31 DES 2019	REALISASI 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	0	0,00
Pendapatan Lain-lain	89.369.608	3.400.000	0,00
Jumlah Pendapatan	89.369.608	3.400.000	0,00

Realisasi Belanja

Anggaran

Rp32.857.370.996

B.2. Belanja

Realisasi belanja KPU Kabupaten Sukoharjo pada TA 2019 adalah sebesar **Rp32.857.370.996** atau **96,56** persen dari anggaran belanja sebesar **Rp34.027.640.000**. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

URAIAN	TA 2019		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	2.434.668.000	2.383.307.494	97,89
Belanja Barang	31.237.240.000	30.124.354.752	96,44
Belanja Modal	355.732.000	349.708.750	98,31
Total Belanja Kotor	34.027.640.000	32.857.370.996	96,56
Pengembalian Belanja		118.117.316	0,00
Belanja Netto	34.027.640.000	32.739.253.680	96,21

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar **84,63** persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terdapat Realisasi belanja Tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2019 dan Tahapan Pilkada 2020 yang dilaksanakan di Tahun 2019 sehingga menyebabkan anggaran dan realisasinya lebih besar dibandingkan TA 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI TA2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.383.307.494	2.396.183.736	(0,54)
Belanja Barang	30.124.354.752	14.703.433.965	104,88
Belanja Modal	349.708.750	696.517.300	(49,79)
Jumlah Belanja	32.857.370.996	17.796.135.001	84,63

Belanja Pegawai
Rp2.383.307.494

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.383.307.494 dan Rp2.396.183.736. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2019 mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain: adanya pegawai di KPU Kabupaten Sukoharjo pada bulan Agustus 2019 yang melaksanakan tugas belajar.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	749.323.391	719.476.508	4,15
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	1.633.984.519	1.676.707.463	(2,55)
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja hibah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.383.307.910	2.396.183.971	(0,54)
Pengembalian Belanja Pegawai	416	235	-
Jumlah Belanja Bersih	2.383.307.494	2.396.183.736	(0,54)

Belanja Barang
Rp30.124.354.752

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp30.124.354.752 dan Rp14.703.433.965.

Realisasi Belanja Barang Per TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 2.452,90 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan oleh karena

pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang anggaran dan realisasinya lebih besar dibandingkan pada TA 2018.

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	350.505.650	286.395.600	22,39
Belanja Barang Non Operasional	25.419.595.218	11.433.916.250	122,32
Belanja Jasa	2.303.238.749	1.179.552.211	95,26
Belanja Pemeliharaan	182.131.435	92.801.635	96,26
Belanja Barang Persediaan	222.634.400	789.237.605	100,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.764.366.200	921.530.664	91,46
Jumlah Belanja Kotor	30.242.471.652	14.703.433.965	105,68
Pengembalian Belanja	118.116.900	-	-
Jumlah Belanja Bersih	30.124.354.752	14.703.433.965	104,88

Belanja Modal
Rp349.708.750

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp349.708.750 dan Rp696.517.300. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan 49,79 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan pada Periode TA 2018 terdapat pengadaan belanja modal peralatan dan mesin untuk persiapan Pemilu 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	349.708.750	696.517.300	(49,79)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	349.708.750	696.517.300	(49,79)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	349.708.750	696.517.300	(49,79)

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada Belanja Modal Tanah Per TA 2019 dan TA 2018.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp349.708.750

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp349.708.750 dan Rp696.517.300.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	349.708.750	696.517.300	(49,79)
Jumlah Belanja Kotor	349.708.750	696.517.300	(49,79)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	349.708.750	696.517.300	(49,79)

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2019 dan 2018

Keterangan	TA 2019	TA 2018
Bank BRI No.051101000426306	-	-
Uang Tunai di brankas	-	-
Kuitansi UP yang belum di SP2D kan	-	-
Pembulatan karena sulitnya recehan	-	-
Jumlah	-	-

Terdapat sisa Uang Persediaan Yang disetor Ke Kas Negara Senilai Rp 523.200 dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 30 Desember 2019.

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 dan 2018

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, KPU Kabupaten Sukoharjo Mendapat Hibah dari Pemerintah Daerah Sukoharjo Sebesar Rp 23.138.918.000. Pada Tahun Anggaran 2019, telah ditransfer dana Operasional Tahapan Pemilihan tersebut sebesar Rp 100.778.000. Dana tersebut telah dimasukkan dalam Revisi kedelapan DIPA KPU Kabupaten Sukoharjo. Adapun realisasi dana hibah tersebut telah di-SP2HL-kan Ke KPPN senilai Rp 99.710.200. sedangkan sisanya telah disetor kembali ke kas Pemerintah Daerah Sukoharjo senilai 1.067.800 dan telah di SP4HLkan ke KPPN. Oleh karena itu tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019.

Beban Dibayar di Muka Rp0

C.3 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp60.000.000. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka Per 31 Desember 2019 dan 2018

Jenis	TH 2019	TH 2018
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gudang	-	60.000.000
Jumlah	-	60.000.000

Rincian Beban Dibayar di Muka disajikan pada lampiran.

Persediaan Rp355.341.306

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp355.341.306 dan Rp3.377.360.711.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018

Persediaan	2019	2018
Barang Konsumsi	-	-
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	-	-
Bahan Baku		1.871.919.805
Persediaan Lainnya	355.341.306	1.505.440.806
Jumlah	355.341.306	3.377.360.611

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Adapun rincian Barang Persediaan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Bilik Suara Alumunium	6.891	Rp 51.566	Rp 355.341.306

Tanah
Rp0

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPU Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan karena tanah yang digunakan merupakan pinjam pakai dari Pemda Sukoharjo.

Peralatan dan
Mesin
Rp1.853.748.094

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp1.853.748.094 dan Rp1.500.569.344. Terdapat Mutasi nilai Peralatan dan Mesin pada tahun 2019, sehingga nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2019	Rp	1.500.569.344
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	349.708.750
Penggunaan Kembali BMN yg dihentikan	Rp	8.470.000
Mutasi kurang:		
penghentianPenggunaan BMN	Rp	(5.000.000)
Transfer keluar (Barang Ekstrakomtabel)	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	1.853.748.094
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(998.415.395)
Nilai Buku per 31Desember 2019	Rp	855.332.699

Mutasi Tambah tersebut berupa:

- a. Pembelian 1 Set Meubelair (Rak buku) senilai Rp 15.000.000
- b. Pembelian 1 Set Meubelair (Sofa Sudut) senilai Rp 4.500.000
- c. Pembelian 4 buah AC senilai Rp 15.888.750
- d. Pembelian 1 Set Meubelair (Sofa Tamu) Senilai Rp 7.600.000
- e. Pembelian 1 buah Laptop Senilai Rp 4.020.000
- f. Pengadaan Kendaraan dinas roda empat senilai Rp 302.700.000
- g. Reklasifikasi masuk berasal dari pengaktifan kembali yang telah dihentikan penggunaannya, yaitu 2 buah tustle senilai Rp 8.470.000

Mutasi Kurang berupa penghentian penggunaan aset, yaitu 2 buah tustle senilai Rp 5.000.000

Rincian Aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp 0.

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan kantor yang digunakan KPU Kabupaten Sukoharjo berstatus Pinjam Pakai dari Pemda Sukoharjo.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(998.415.395)

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(998.415.395) dan Rp(807.850.218). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 dan 2018

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2019	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.853.748.094	998.415.395	855.332.699
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	1.853.748.094	998.415.395	855.332.699

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

C. 9 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp369.239.625

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp369.239.625 dan Rp372.709.625. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Rincian Aset Lain-lain 31 Desember 2019

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	369.239.625
2	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	-
	Jumlah	369.239.625

Tidak ada mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2019, sehingga aset tetap yang tidak digunakan dalam pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2018	372.709.625
Mutasi tambah:	
reklasifikasi dari aset tetap	5.000.000
Mutasi kurang:	
penggunaan kembali BMN yang dihentikan	(8.470.000)
Saldo per 31 Desember 2019	369.239.625
Akumulasi penyusutan	(369.239.625)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	-

Aset tersebut saat ini telah diajukan penghapusan ke KPU RI dan telah dilakukan lelang di KPKNL Surakarta, namun belum dapat dihapuskan dari laporan karena masih menunggu surat Keputusan Penghapusan dari KPU RI. Adapun rincian Aset lain-lain pada periode 01 Januari 2019 adalah sebagai

berikut.

- a. 2 (dua) buah kodak senilai Rp5.000.000;
- b. 1 (satu) buah Tustel senilai Rp5.500.000;
- c. 1 (satu) buah handycam senilai Rp7.945.000;
- d. 7 (tujuh) buah UPS senilai Rp63.000.000;
- e. 3 (tiga) buah PC Unit Senilai Rp12.000.000;
- f. 1 (satu) buah PC Unit Senilai Rp13.600.000;
- g. 1 (satu) buah PC Unit Senilai Rp10.750.000;
- h. 1 (satu) buah Facsimile Senilai Rp1.950.000;
- i. 1 (satu) buah Laptop Senilai Rp12.750.000;
- j. 1 (satu) buah Laptop Senilai Rp6.950.000;
- k. 1 (satu) buah Laptop Senilai Rp6.950.000;
- l. 3 (tiga) buah Note book Senilai Rp40.500.000;
- m. 4 (empat) buah NoteBook Senilai Rp32.300.000;
- n. 1 (satu) buah Hub Senilai Rp400.000;
- o. 2 (dua) buah printer Senilai Rp1.450.000;
- p. 1 (satu) buah Printer Senilai Rp3.900.000;
- q. 1 (satu) buah Scanner Senilai Rp3.975.000;
- r. 1 (satu) buah Mini Bus Senilai Rp112.700.000;
- s. 1 (satu) buah Sepeda Motor Senilai Rp10.971.500;

Kemudian pada TA 2019 terdapat koreksi dikarenakan salah pencatatan, yaitu: penggunaan kembali aset BMN yang telah dihentikan berupa 2 (dua) buah Tustel senilai Rp8.470.000 dan Reklasifikasi dari aset berupa penghentian penggunaan Aset berupa 2 (dua) buah Kodak yang telah rusak senilai Rp5.000.000

Rincian Aset lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran laporan keuangan ini

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(369.239.625)

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(369.239.625) dan Rp(372.709.625). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	369.239.625	(369.239.625)	0
Jumlah	369.239.625	(369.239.625)	0

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.11 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun Rincian utang pihak ketiga KPU Kabupaten Sukoharjo pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-	Pendapatan Jasa Giro belum disetor ke kas negara
Potongan pajak yang belum disetor	-	Potongan pajak belanja UP belum disetor ke kas negara
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak
Total	-	

Beban yang harus
dibayar

Rp3.615.806

C.13 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp3.615.806 dan Rp3.398.041, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
Per 31 Desember 2019 dan 2018*

Uraian	TH 2019	TH 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3.615.806	3.398.041
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	3.615.806	3.398.041

Beban Yang masih harus dibayar tersebut berasal dari Beban Tagihan Listrik, telepon dan Speedy bulan Desember 2019 yang dicatat dalam transaksi Jurnal Penyesuaian di aplikasi SAIBA dan masuk kedalam Utang Pihak Ketiga dalam Laporan Neraca yang dihasilkan aplikasi tersebut. Adapaun rinciannya sebagai berikut :

- Beban Tagihan Listrik Desember 2019 sebesar Rp 2,437,283
- Beban Tagihan Telepon Desember 2019 Sebesar Rp 136,023
- Beban Tagihan Speedy bulan Desember 2019 Sebesar Rp 1.042.500

Ekuitas

Rp1.207.058.199

C.14 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.207.058.199 dan Rp4.126.681.796. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	NAIK (TURUN) %
1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	0,00
2. Pendapatan Jasa	-	-	0,00
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	0,00
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan	-	-	0,00

Beban Pegawai
Rp2.383.307.494

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.383.307.494 dan Rp2.362.012.182. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	2019	2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji	749.322.975	719.476.273	4,15
Beban Tunjangan-Tunjangan	1.633.984.519	1.642.535.909	(0,52)
Beban Honorarium dan Vakasi	-	0	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	2.383.307.494	2.362.012.182	3,63

Beban Persediaan
Rp4.561.302.550

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.561.302.550 dan Rp719.201.613.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	2019	2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	98.993.150	96.259.075	3
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan bahan baku	4.461.306.400	622.758.038	616
Beban Persediaan Lainnya	1.003.000	184.500	444
Jumlah	4.561.302.550	719.201.613	1.063

Beban Barang
dan Jasa
Rp28.015.440.482

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp28.015.440.482 dan Rp12.892.891.128. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan Jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	2019	2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	25.770.100.868	11.719.574.850	120
Beban Langganan Daya dan Jasa	687.252.735	626.261.778	10
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	-
Beban Jasa Konsultan	0	0	-
Beban Jasa lainnya	1.558.086.879	494.304.500	215
Beban Aset Ekstrakomtabel	-	52.750.000	(100)
Jumlah	28.015.440.482	12.892.891.128	245

Beban
Pemeliharaan
Rp183.687.185

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp183.687.185 dan Rp98.672.635. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	2019	2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	39.000.000	11.300.000	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143.131.435	81.501.635	75,62
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.205.750	5.671.000	(78,74)
Beban persediaan suku cadang	350.000	200.000	75,00
Jumlah	183.687.185	98.672.635	75,62

Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.764.366.200

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.764.366.200 dan Rp921.530.664. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	2019	2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	382.842.200	446.201.800	(14,20)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.980.000	97.557.500	721,03
Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	534.070.000	319.754.100	67,03
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46.474.000	58.017.264	(19,90)
Jumlah	1.764.366.200	921.530.664	91,46

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp 0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2018.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp187.095.177

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp187.095.177 dan Rp105.952.351. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2019	2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	187.095.177	105.952.351	77
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	187.095.177	105.952.351	77
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	187.095.177	105.952.351	77

Surplus/Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional Rp
(1.238.898.392)

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	Naik (Turun) %
Surplus (defisit) penjualan Aset Non Lancar	77.942.108	0	-
Surplus (defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	(1.316.840.500)	5.733.400	-
Surplus (defisit) kegiatan non Operasional	(1.238.898.392)	5.733.400	(21.708)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	-
Jumlah	0	0	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.126.681.796

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.126.681.796 dan Rp 1.623.052.455

Defisit LO
Rp(38.334.097.480)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp(38.334.097.480) dan Rp(17.094.527.173). Defisit LO merupakan selisih kurang antar surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

Penyesuaian Nilai Aset
Rp 0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai penyesuaian nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0 dan 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencakup koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat koreksi nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp 0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset Tetap. Tidak terdapat selisih revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018

Koreksi Aset Tetap non Revaluasi
Rp0

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tidak terdapat koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018

Koreksi lain-lain Rp0

E.3.5 Koreksi lain-lain

Tidak terdapat koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar

Entitas

Rp35.414.473.883

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp35.414.473.883 dan Rp19.598.156.514. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(89.369.608)
Ditagihkan ke Entitas Lain	32.757.660.796
Transfer masuk	2.646.472.495
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	100.778.000
Pengesaan Pengembalian Hibah Langsung	(1.067.800)
Jumlah	35.414.473.883

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp(89.369.608), sedangkan DKEL sebesar Rp32.757.660.796.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Pada Periode hingga tanggal 31 Desember 2019 nilai Transfer Masuk sebesar

Rp2.646.472.495 sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0.

No	Uraian	Entitas Pengirim	Nilai
1	Persediaan (Logistik Pemilu 2019)	KPU RI	2.646.472.495
	Jumlah		2.646.472.495

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp 100.778.000.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Senilai Rp 1.067.800

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemda Sukoharjo	Uang	Rp 100.778.000
Total Pengesahan			Rp 100.778.000
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp 1.067.800
Jumlah			Rp 99.710.200

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.207.058.199 dan Rp4.126.681.796

Ekuitas Akhir
Rp1.207.058.199

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal pelaporan Per 31 Desember 2019.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. DIPA Tahun Anggaran 2019 Pada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sudah melakukan 8(delapan) kali revisi:
 - a. Revisi Pertama tanggal 22 Maret 2019
 - b. Revisi Kedua tanggal 02 April 2019
 - c. Revisi Ketiga tanggal 14 Juni 2019
 - d. Revisi Keempat tanggal 26 Juni 2019
 - e. Revisi Kelima tanggal 27 Agustus 2019
 - f. Revisi Keenam tanggal 21 Nopember 2019
 - g. Revisi ketujuh tanggal 28 Nopember 2019
 - h. Revisi Kedelapan tanggal 23 Desember 2019
2. Informasi belanja secara akrual untuk KPU Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2019 dan telah dicatat dalam Jurnal Penyesuaian Aplikasi SAIBA antara lain:
 - a. Beban pemakaian Langganan Listrik bulan Desember 2019 senilai Rp 2,437,283
 - b. Beban pemakaian Langganan Telepon bulan Desember 2019 senilai Rp 136,023
 - c. Beban pemakaian langganan Speedy bulan Desember 2019 senilai Rp 1,042,500
3. Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor:44/KT/LKKPU/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Penyampaian Catatan Pemeriksaan, bahwa terdapat temuan kelebihan pembayaran Kelompok Kerja di KPU Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2019 yang bersumber dari APBN senilai Rp11.427.500,- dan Pemilu Gubernur 2018 yang bersumber dari APBD senilai Rp41.821.000. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyetor kelebihan pembayaran ke

kas negara dengan SSBP pada tanggal 28 Maret 2019.

4. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, KPU Kabupaten Sukoharjo Mendapat Hibah dari Pemerintah Daerah Sukoharjo Sebesar Rp 23.138.918.000. Pada Tahun Anggaran 2019, telah ditransfer dana Operasional Tahapan Pemilihan tersebut sebesar Rp 100.778.000. Dana tersebut telah dimasukkan dalam Revisi kedelapan DIPA KPU Kabupaten Sukoharjo. Adapun realisasi dana hibah tersebut telah di-SP2HL-kan Ke KPPN senilai Rp 99.710.200. sedangkan sisanya telah disetor kembali ke kas Pemerintah Daerah Sukoharjo senilai 1.067.800 dan telah di SP4Hlkan ke KPPN.
5. Daftar Rekening KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

No	Nomor	Nama	Bank	Surat Ijin		Ket
				Nomor	Tanggal	
1	051101000426306	BPG 028 KPU KABUPATEN SUKOHARJO	PT BRI (Persero) Cabang Sukoharjo	S- 253/WPB.14/KP .028/2015	18/03/2015	APBN
2	1030007391	RPL 028 PDHL KPU SKH 2G5CRGMA	Bank Jateng Cabang Sukoharjo	S-3420/01/2019	11/10/2019	APBD